

TINJAUAN EKONOMI MAKRO

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016

2017



KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

**TINJAUAN EKONOMI MAKRO
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016**

Ukuran buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman :

NASKAH :

*Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

GAMBAR KULIT :

Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur

DITERBITKAN OLEH :

BPS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

KATA SAMBUTAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Sayamenyambut baik dengan diterbitkannya publikasi “Tinjuan Ekonomi Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016” yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Data dari publikasi ini selain bermanfaat sebagai tolok ukur penilaian dan analisa terhadap hasil pembangunan daerah yang telah dicapai, juga dapat menjadi petunjuk baik bagi pemerintah maupun swasta dalam menyusun perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur saya ucapkan terima kasih atas upaya pembuatan publikasi ini. Kepada dinas/instansi-instansi terkait saya minta agar dapat membantu penerbitan publikasi ini dengan memberikan data yang lebih akurat dan lengkap sehingga penerbitan yang akan datang akan lebih baik.

Semoga publikasi ini memberi manfaat dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Muara Sabak, Juli 2017



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

KATA SAMBUTAN

KEPALA BAPPEDA TANJUNG JABUNG TIMUR

Publikasi “Tinjauan Ekonomi Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016” merupakan salah satu hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan penerbitan buku ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang struktur pertumbuhan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur yang memberikan bimbingan dan bantuan serta mempercayakan tugas kepada kami.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta staf yang telah bekerjasama dalam penerbitan buku ini.
3. Kepala-kepala dinas instansi/jawatan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terwujudnya penerbitan publikasi ini.

Saran dan kritik membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penyusunan buku ini dimasa-masa mendatang sangat kami harapkan dan kerja sama yang baik ini dapat terus ditingkatkan.

Muara Sabak, Juli 2017

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



AGUS PIRNGADI, S.SOS

KATA PENGANTAR

Publikasi “Tinjuan Ekonomi Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016” ini merupakan publikasi perdana dan direncanakan akan diterbitkan secara berkala setiap tahunnya.

Buku ini antara lain memuat uraian kegiatan per sektor dan subsektor yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diantaranya struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi serta perkembangan beberapa indikator ekonomi lainnya, sehingga dengan menggunakan buku ini diharapkan para konsumen data khususnya para perencana pembangunan di bidang ekonomi dapat melihat sektor-sektor mana yang perlu ditenahi/dipacu atau sebaliknya. Namun dalam publikasi ini, hanya dibahas PDRB sektoral dan belum membahas PDRB menurut penggunaan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga publikasi ini dapat terwujud, disampaikan banyak terima kasih. Kami menyadari bahwa publikasi ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan baik dalam segala hal. Saran dan kritik kami harapkan dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat.

Muara Sabak, Juli 2017

Kepala BPS Kab. Tanjung Jabung Timur



[Signature]
IRNA AFRIANTI, S.Si

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Sambutan Bupati Tanjung Jabung Timur.....	i
Kata Sambutan Kepala BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Timur	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Umum.....	1
1.2 Manfaat Data PDRB.....	3
1.3 Konsep dan Definisi	3
 BAB II Metodologi dan Ruang Lingkup	 5
2.1 Metode Penghitungan PDRB	5
2.2 Cara Penyajian Angka Indeks	7
2.3 Disparitas Pendapatan Antar Daerah	8
2.4 Ruang Lingkup Kategori Lapangan Usaha	10
2.4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10
2.4.2 Pertambangan dan Penggalian	15
2.4.3 Industri Pengolahan	18
2.4.4 Pengadaan Listrik dan Gas	24
2.4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26
2.4.6 Konstruksi	27
2.4.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28
2.4.8 Transportasi dan Pergudangan	30
2.4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34
2.4.10 Informasi dan Komunikasi	35
2.4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	37
2.4.12 Real Estate	45
2.4.13 Jasa Perusahaan	45
2.4.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	47
2.4.15 Jasa Pendidikan	48
2.4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48
2.4.17 Jasa Lainnya	49

BAB III	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53
3.1	Peranan Kategori Lapangan Usaha	56
3.2	Perkembangan Harga	61
3.3	PDRB Per Kapita	62
BAB IV	Tinjauan Kategori Lapangan Usaha.....	67
4.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	67
4.2	Pertambangan dan Penggalian	68
4.3	Industri Pengolahan	69
4.4	Pengadaan Listrik dan Gas	69
4.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	70
4.6	Konstruksi	70
4.7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	70
4.8	Transportasi dan Pergudangan	71
4.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71
4.10	Informasi dan Komunikasi	71
4.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	72
4.12	Real Estate	72
4.13	Jasa Perusahaan	72
4.14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	73
4.15	Jasa Pendidikan	73
4.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73
4.17	Jasa Lainnya	74
BAB V	Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah	75
5.1	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen	75
LAMPIRAN		77

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (Miliar Rupiah).....	54
Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016.....	55
Grafik 3.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016.....	56
Grafik 3.4 Kontribusi Lima Kategori Kontributor Terbesar Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016.....	58
Grafik 3.5 Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012- 2016 (persen).....	61
Grafik 3.6 Laju Pertumbuhan dan Laju Indeks Implisit Per Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 (persen).....	62
Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen).....	63
Grafik 3.8 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tanpa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen).....	65
Grafik 5.1 Plot Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Jambi Tahun 2016.....	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi Wilayah Menurut Klassen Typology.....	9
Tabel 3.1 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Masing-masing Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 (%).....	59
Tabel 3.2 Hubungan Antara Kontribusi dengan Laju Pertumbuhan Masing-masing Kategori Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016.....	60
Tabel 3.3 PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (Rupiah).....	64
Tabel 3.4 Perkembangan PDRB Perkapita Tanpa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (Rupiah).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 -2016 (Juta Rupiah).....	77
2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah).....	78
3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun, 2012-2016 (Persen).....	79
4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016.....	80
5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016.....	81
6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen).....	82
7. Sumber Pertumbuhan (<i>Source of Growth</i>) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016.....	83
8. Sumber Pertumbuhan (<i>Source of Growth</i>) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016.....	84

BAB I

PENDAHULUAN



Bab I

Pendahuluan

1.1. Umum

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari sisi penggunaan, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Namun dari sisi sektoral, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi dari seluruh sektor ekonomi dari sektor pertanian, pertambangan sampai sektor jasa-jasa pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB/PDRB, tetapi dalam praktek angka yang lebih sering dipakai adalah melalui PDB/PDRB, karena angka PDB/PDRB hanya melihat batas wilayah, terbebas pada negara yang bersangkutan. Sedangkan agar ekonomi semakin berkembang dan tumbuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Ekonomi Indonesia tidak akan maju dan berkembang jika tidak didukung oleh salah satu faktor tersebut, jadi antara satu dengan yang lainnya berkesinambungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan yang telah dilaksanakan, sedangkan pendapatan perkapita pertahun merupakan indikator kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Indikator-indikator ekonomi tersebut merupakan bahan acuan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dengan demikian hasil penghitungan PDRB diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah sesungguhnya.

Sehubungan dengan telah dilakukannya pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung menjadi dua

kabupaten definitif yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka guna memenuhi kebutuhan informasi mengenai keadaan dan perkembangan perekonomian pada dua kabupaten ini telah dilakukan penghitungan PDRB secara terpisah.

Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi tidak dapat pula dipisahkan dari Pendapatan Nasional. Agar konsistensi hasil penghitungan antara PDRB Kabupaten, PDRB Provinsi, dan PDRB Nasional tetap terjaga, maka ketiganya menggunakan serangkaian metode penghitungan yang sama, baik dari segi konsep maupun metodologinya.

Metode penghitungan Produk Domestik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai tahun 2014 menggunakan metode langsung yaitu penghitungan dengan menggunakan data yang langsung dikumpulkan dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar penghitungannya.

Pada beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan trend yang fluktuatif, dari 2,78 persen di tahun 2012 meningkat menjadi 4,57 persen pada tahun 2013 dan 5,81 pada tahun 2014. Dengan adanya peningkatan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi pada beberapa tahun terakhir menyebabkan laju pertumbuhan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Untuk tahun 2015, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 1,87 persen hal ini disebabkan karena pada tahun ini eksploitasi minyak dan gas bumi menurun cukup signifikan. Kategori Pertambangan dan Penggalian khususnya Subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi pada tahun-tahun mendatang kemungkinan akan semakin besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur walaupun untuk jangka panjang akan semakin berkurang produksinya. Namun, pada tahun 2016 ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedikit mengalami percepatan dengan pertumbuhan sebesar 2,70 persen. Hal ini didukung oleh pertumbuhan beberapa sektor yang cukup signifikan antara lain kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang cukup tinggi sebesar 8,94 persen dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten sebesar 19,94 persen. Selain itu juga ditopang oleh laju pertumbuhan kategori Kontruksi yang tumbuh sebesar 6,54 persen; kategori Transportasi dan

Pergudangan sebesar 7,74 persen; kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,95 persen, kategori Real Estate sebesar 4,06 persen; dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 8,59 persen.

1.2. Manfaat Data PDRB

Data Produk Domestik Regional Bruto yang disajikan, secara umum merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Manfaat data PDRB antara lain:

- a. Mengukur laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut secara sektoral, sehingga dapat memonitor sektor-sektor apa saja yang menyebabkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dengan demikian dapat diberikan prioritas pada sektor-sektor tertentu.
- b. Mengetahui struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini tercermin dari peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB wilayah tersebut. Disamping itu dapat dilihat ada tidaknya pergeseran struktur ekonomi dari sektor satu ke sektor lainnya.
- c. Data PDRB yang disajikan apabila dihubungkan dengan data tenaga kerja yang terserap di masing-masing sektor dapat dihasilkan PDRB per tenaga kerja yang menggambarkan produktivitas tenaga kerja tiap sektor.
- d. Mengukur elastisitas penyerapan tenaga kerja setiap sektor, untuk memproyeksikan seberapa besar kesempatan kerja yang ada dimasa mendatang.
- e. Dapat melihat perubahan harga tiap tahunnya secara tertimbang.

1.3. Konsep dan Definisi

Konsep-konsep yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik ini adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar.

Angka PDRB atas dasar harga pasar diperoleh dari penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan, yaitu upah dan gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar harga pasar.

Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar ini sudah dikeluarkan nilai penyusutan. Penyusutan ini adalah susutnya nilai barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut dari seluruh barang disektor perekonomian dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar biaya faktor produksi.

Diperoleh dari PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Sedangkan pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pajak tak langsung ini meliputi pajak penjualan, pajak tontonan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.

4. Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan diatas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di Kabupaten tanjung Jabung Timur. Balas jasa faktor produksi adalah : upah dan gaji, bunga sewa tanah, dan laba/keuntungan yang ditimbulkan atau merupakan pendapatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan selain itu juga pendapatan yang mengalir keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sehingga yang dimaksud dengan Produk Domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Produk Domestik Regional Neto ditambah dengan pendapatan dan penerimaan dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikurangi dengan pendapatan/penerimaan yang mengalir keluar ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Oleh sebab itu dalam penghitungan ini pendapatan yang keluar dan masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur diasumsikan saling meniadakan sehingga Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor sama dengan Pendapatan Regional. Apabila Pendapatan Regional ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka merupakan Pendapatan per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP



Bab II

Metodologi dan Ruang Lingkup

2.1. Metode Penghitungan PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan dalam hal ini tahun 2016. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung produksi atas dasar harga pada tahun 2010.

2.1.1. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku:

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu :

- a. **Metode langsung** adalah metode penghitungan dengan menggunakan data daerah sehingga hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut.

Metode langsung dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu

a.1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi ini menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi dengan mengurangi biaya antara dari masing-masing sektor tersebut. Pendekatan produksi ini digunakan untuk menghitung sektor pertanian, pertambangan, industri dan lain sebagainya.

a.2. Pendekatan Pendapatan

Penghitungan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang diperkirakan dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Metode pendekatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa, seperti pemerintahan, bank & lembaga keuangan lainnya dan jasa-jasa.

a.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pendekatan pengeluaran ini digunakan untuk menghitung PDRB menurut penggunaan yang terperinci.

b. Metode Tak Langsung

Metode ini penghitungan nilai tambah dengan cara menggunakan data nasional, yaitu dengan menggunakan metode alokasi. Alokasi yang biasa digunakan antara lain adalah :

- a. Nilai Produksi Bruto/Neto
- b. Tenaga kerja
- c. Penduduk
- d. Alokator Tidak Langsung
- e. Jumlah Produksi

2.1.2. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Angka pendapatan regional atas dasar harga konstan sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah PDRB, PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita.

Metode Dasar Untuk Penghitungan Pertumbuhan Riil

Pertumbuhan riil dari agregat ekonomi diturunkan dengan cara menghilangkan pengaruh dari perubahan harga pada angka atas dasar harga berlaku, sehingga didapatkan angka atas dasar harga konstan. Bila angka atas dasar harga konstan dari agregat-agregat ekonomi dinyatakan dalam harga tahun dasar yang sama, maka analisis perbandingan akan dapat dilakukan dan seluruh agregat tersebut bisa diturunkan menurut kegiatan atau subkategorinya.

Tiga metode dasar berikut adalah untuk merubah angka atas dasar harga berlaku menjadi angka atas dasar harga konstan. Metode-metode tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk seluruh komponen PDRB, seperti permintaan akhir, output, input antara dan komponen nilai tambah. Metode ini antara lain adalah :

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Metode ini dilakukan dengan cara memperbaharui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun.

c. Deflasi

Metode ini dilakukan dengan membagi nilai masing-masing tahun dengan relatif harga yang sesuai indeks harga (1/100).

Perlu diperhatikan disini dalam kasus ekstrapolasi yang dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan riil itu sendiri dapat dihitung dengan menggunakan revaluasi atau deflasi. Metode penghitungan yang sebenarnya dapat menggunakan kombinasi dari ketiga metode tersebut.

2.2. Cara Penyajian Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan pada konsep dan definisi sebelumnya, secara seri dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar.

- a. Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara pada penilaian komponen nilai tambah komponen pengeluaran PDRB.
- b. Penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ketahun semata-mata karena perkembangan produksi riil dan bukan fluktuasi kenaikan harga.

Agregat-agregat pendapatan juga disajikan dalam bentuk angka-angka indeks yaitu indeks perkembangan, laju pertumbuhan dan indeks harga implisit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Perkembangan

Diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.

b. Angka Laju Pertumbuhan

Diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100 kemudian dikurangi 100. Angka ini menunjukkan tingkat

perkembangan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Indeks Harga Implisit

Didapat dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, kemudian dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

2.3. Disparitas Pendapatan Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Klassen Typology

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan klasifikasi tiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda yaitu:

- a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

- b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (low growth but high income) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
- c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (high growth but low income) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
- d. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (low growth and low income) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

Tabel 2.1. Klasifikasi Wilayah Menurut Klassen Typology

	$Y_{ij} < \bar{Y}_j$	$Y_{ij} > \bar{Y}_j$
$R_{ij} > \bar{R}_j$	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat
$R_{ij} < \bar{R}_j$	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal	Kuadran III Daerah berkembang cepat

Keterangan:

R_{ij} = Laju pertumbuhan PDRB ADHK tiap kabupaten/kota

$\bar{R}_j$ = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jambi

Y_{ij} = PDRB per kapita ADHB tiap kabupaten/kota

$\bar{R}_j$ = Rata-rata PDRB per kapita ADHB Provinsi Jambi

2.4. Ruang Lingkup Kategori Lapangan Usaha

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.4.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan lain-lain), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud gabah kering giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan

BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

b. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

c. Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh,

kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

d. Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan

dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan resiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkat untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-

daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

3. Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di awal periode yang disebut sebagai Work-in-Progress (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.4.2. Pertambangan dan Penggalan

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalan, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalan lainnya.

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi

mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan Indonesia Crude Price (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2. Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama

seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas, BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kota; Dinas Pendapatan Daerah.

3. Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDB triwulan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

2.4.3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

1. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, yang meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk di sini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2. Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

3. Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Khaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan

pada produk spesifik yang dihasilkan. Tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi serta Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan

baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

10. Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

11. Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24

12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

13. Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan

penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

14. Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

15. Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan meubeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan meubeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan meubeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri

dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi, BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing

tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

1. Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga digunakan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2. Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuat;an gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan

keuangan PT PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS, BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen, BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih, BPS.

2.4.6. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode commodity

flow beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang, BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor, BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor, BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar, BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi, BPS.

2.4.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store,

kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “commodity flow approach”. Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi, BPS.

2.4.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

1. Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2. Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkutan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat go public dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan go public angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

5. Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang

digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

6. Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan go public. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara Reksha, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan go public dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana

penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.4.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

1. Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2. Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010, BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi, BPS.

2.4.10. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai

produk multimedia seperti cd room buku referensi, dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji,

laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan go public dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi go public seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

1. Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah,

bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga.

Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2. Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusakanya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil underwriting, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga

konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3. Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar

hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk finance lease untuk digunakan oleh penyewa (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

4. Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi

efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (trustee) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (money changer) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.4.12. Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.4.13. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa

ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.4.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.4.15. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.4.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa

Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.4.17. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima

pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization (WHO), The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

BAB III

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI



Bab III

Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

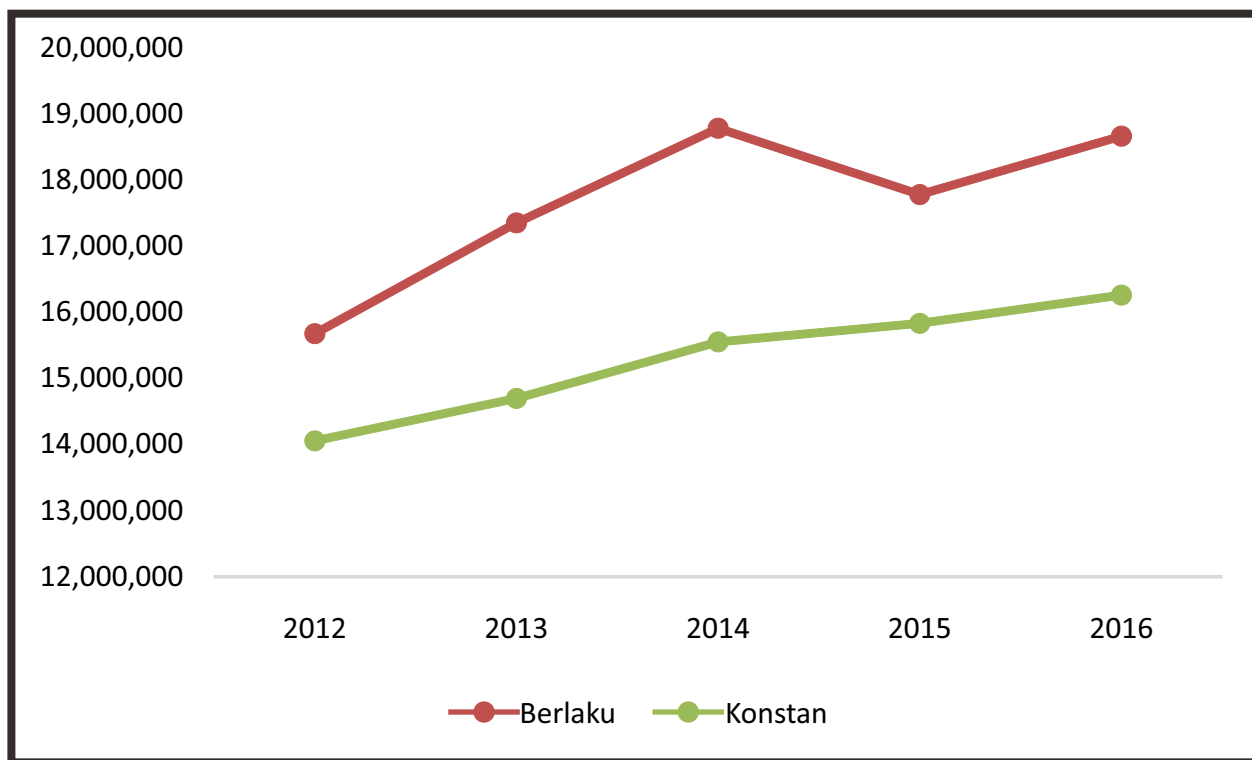
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disajikan menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun disusun sebagai salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 2012-2016 menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 2,78 persen. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,81 persen pada tahun 2014. Namun pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu hanya sebesar 2,70 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto pada sektor pertambangan dan penggalian. Namun, dilihat dari strukturnya, pada tahun 2016 kue ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian dengan share sebesar 48,40 persen, diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,94 persen, dan kategori Industri Pengolahan sebesar 7,93 persen. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian dari tahun 2012-2016 menunjukkan tren turun, sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan tren naik. Hal ini menunjukkan adanya permulaan shifting kue ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Total PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 18.659.679,8 juta rupiah pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,97 persen dari tahun sebelumnya. Namun jika PDRB tanpa migas, angka PDRB atas dasar harga berlaku meningkat 16,40 persen dari Rp 7.269.909,49 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi Rp 8.461.999,97 juta pada tahun 2016. Kategori Pertambangan dan Penggalian masih merupakan kategori yang paling dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini ditunjukkan dengan peranan kategori tersebut pada tahun 2016 sebesar 48,40 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori dominan kedua dengan kontribusi sebesar 19,94 persen, diikuti kategori Industri Pengolahan dengan peranan 7,93 persen. Sedangkan kategori Pengadaan Listrik dan Gas merupakan kategori yang mempunyai peranan terkecil sebesar 0,02 persen diikuti dengan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebagai kategori peranan terkecil kedua sebesar 0,02 persen.

Grafik 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016

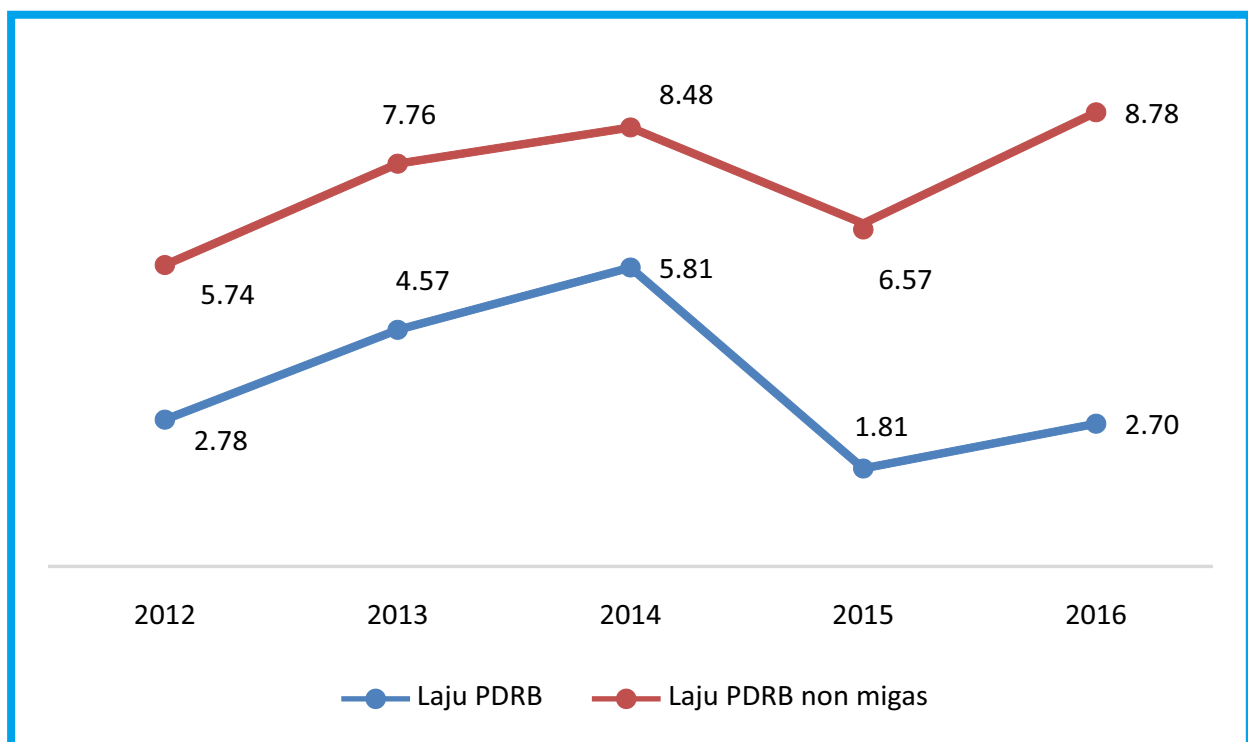
(Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Namun, jika kita lihat PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun 5 tahun terakhir hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 2.204.180,1 juta rupiah. Total PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 16.257.802,4 juta rupiah, meningkat 2,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan total PDRB atas dasar harga konstan 2010 tanpa migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5.640.844,8 juta rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 8,78 persen dibandingkan tahun 2015.

Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

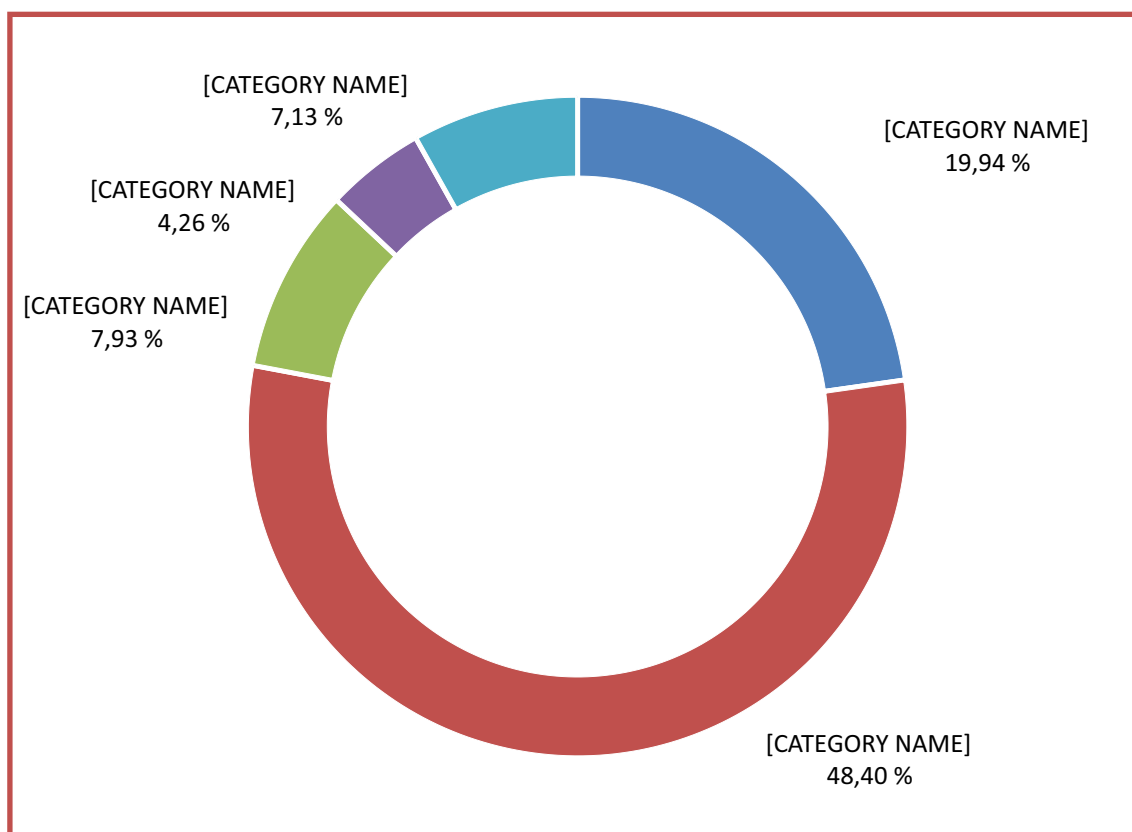
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 2,70 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen dari tahun sebelumnya. Namun jika laju PDRB tanpa migas, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 sebesar 8,78 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,57 persen.

3.1. Peranan Kategori Lapangan Usaha

Peranan/kontribusi kategori lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing kategori lapangan usaha.

Struktur ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2012-2016 hanya mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 2016 struktur ekonomi masih didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalan, diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di urutan kedua, urutan ketiga ditempati oleh kategori Industri Pengolahan, urutan keempat oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan urutan kelima ditempati kategori Konstruksi. Laju pertumbuhan kelimakategori ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Grafik 3.3. Struktur Ekonomi 5 Kategori Terbesar
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

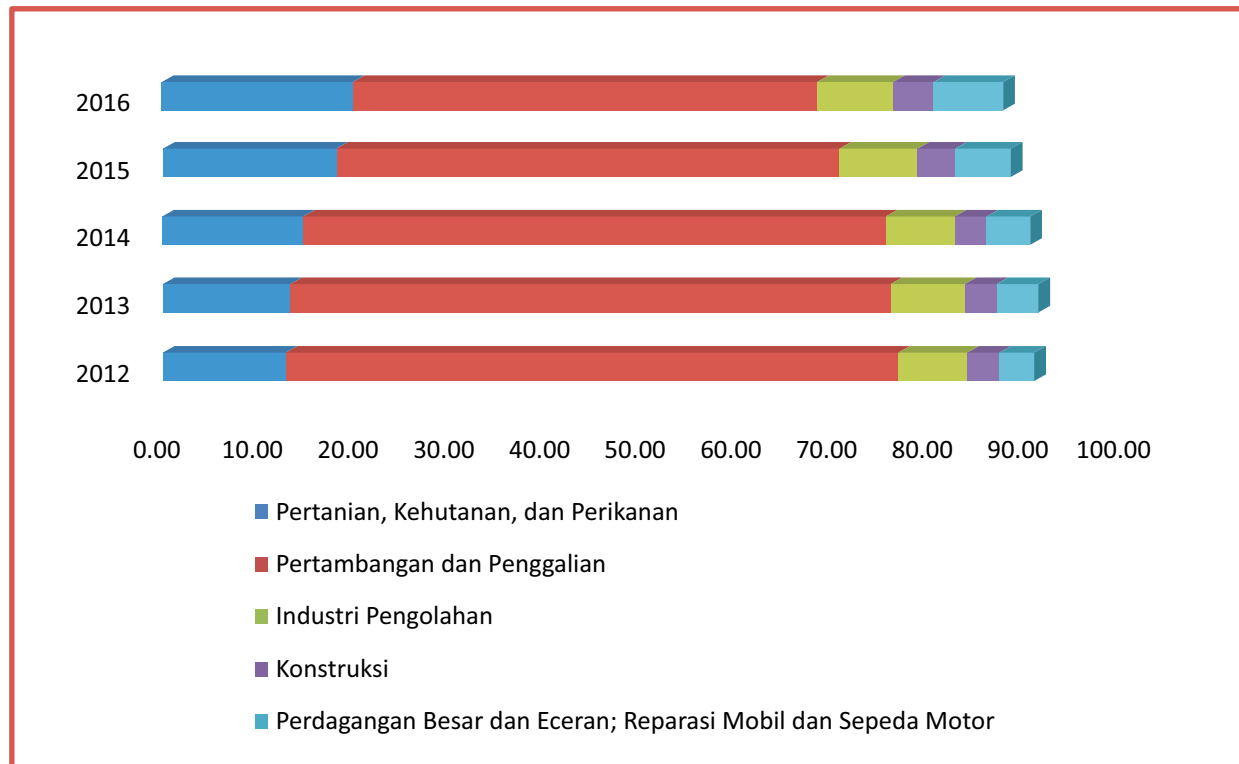
Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 48,40 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,94 persen. Urutan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kategori Pertambangan dan Penggalian memegang peranan paling tinggi dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun kategori Industri Pengolahan, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori Konstruksi memiliki peranan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur masing-masing sebesar 7,93 persen, 7,13 persen dan 4,26 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, share kategori Pertambangan dan Penggalian selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini merupakan nilai kontribusi terendah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Peranan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 64,10 persen. Selain peranan kategori ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan pada tahun 2016 kategori ini juga mengalami penurunan menjadi minus 0,31 persen. Itu artinya menurunnya peranan kategori ini pada tahun 2016 disebabkan karena menurunnya nilai tambah bruto.

Peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2016 sebesar 19,94 persen mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen dibandingkan tahun 2015 peranan sektor ini sebesar 18,14 persen. Hal ini ditopang dengan laju pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,94 persen pada tahun 2016, lebih cepat dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,62 persen.

Kategori Industri Pengolahan kontribusi/peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan dari 8,13 persen pada tahun 2015 menjadi 7,93 persen pada tahun 2016. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2015 kontribusinya meningkat dari 5,86 persen pada tahun 2015 menjadi 7,13 persen pada tahun 2016. Selain itu, kategori Konstruksi sedikit mengalami peningkatan share-nya terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari 4,03 persen pada tahun 2015 menjadi 4,26 persen pada tahun 2016.

**Grafik 3.4. Lima Kategori Kontributor Terbesar Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen)**



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 3.1 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Masing-Masing Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 (%)

No	Kategori	Kontribusi (%)	Laju Pertumbuhan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,94	8,94
2.	Pertambangan dan Penggalian	48,40	-0,31
3.	Industri Pengolahan	7,93	1,08
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	5,07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	5,11
6.	Konstruksi	4,26	6,54
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,13	12,61
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,31	7,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	10,27
10.	Informasi dan Komunikasi	1,48	9,91
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,85	8,95
12.	Real Estate	0,59	8,23
13.	Jasa Perusahaan	1,32	7,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	5,44
15.	Jasa Pendidikan	3,15	8,59
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	9,76
17.	Jasa Lainnya	0,29	7,83
PDRB dengan Migas		100,00	2,70
PDRB tanpa Migas		45,35	8,78

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 3.2 Hubungan Antara Kontribusi dengan Laju Pertumbuhan Masing-masing Kategori Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016

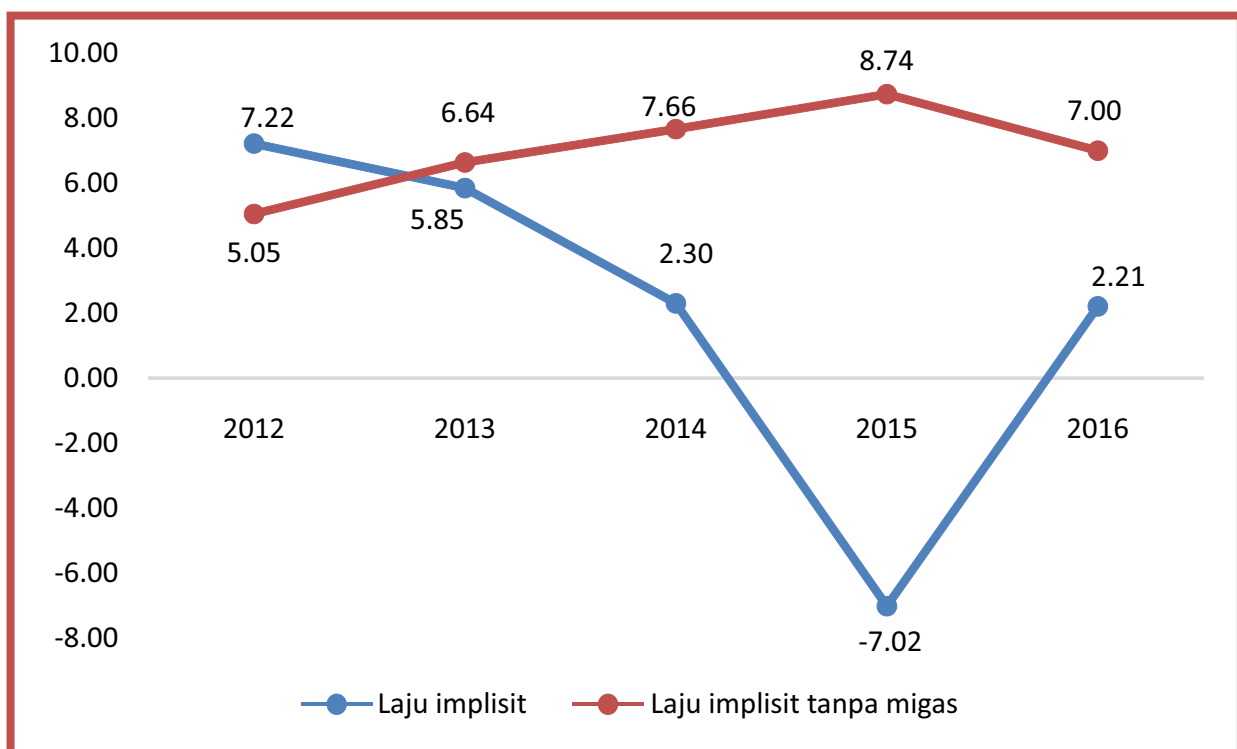
Laju Pertumbuhan	Peranan (persen)		
	0-3	3-10	> 10
[1]	[2]	[3]	[4]
DiatasPDRB Kabupaten	· Pengadaan Listrik dan Gas · Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang · Transportasi dan Pergudangan · Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum · Informasi dan Komunikasi · Jasa Keuangan dan Asuransi · Real Estate · Jasa Perusahaan · Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib · Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial · Jasa Lainnya	· Konstruksi · Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor · Jasa Pendidikan	· Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Dibawah PDRB Kabupaten		· Industri Pengolahan	· Pertambangan dan Penggalian

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.2. Perkembangan Harga

Perkembangan harga atau inflasi pada tingkat produsen dapat dilihat pada tabel laju indeks implisit (lampiran tabel 10). Tabel ini memperlihatkan perkembangan harga dari tahun ke tahun untuk masing masing kategori serta dapat memperlihatkan tingkat perkembangan harga secara keseluruhan. Secara total perkembangan harga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tingkat produsen di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,21 persen sedangkan laju implisit tanpa migas sebesar 7,00 persen. Hal ini dipengaruhi karena terjadinya penurunan harga migas pada kategori Pertambangan dan Penggalan.

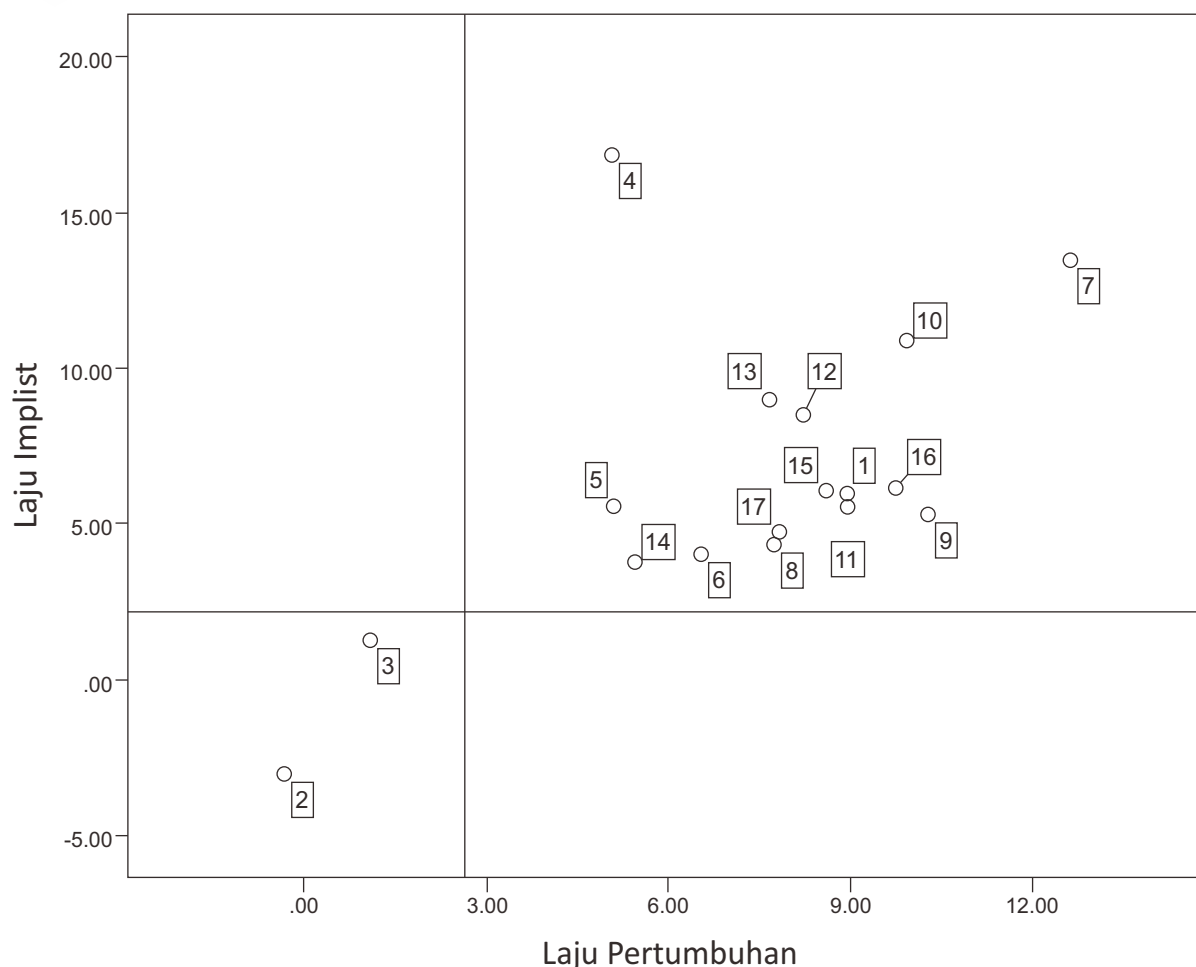
Grafik 3.5. Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tingkat harga tertinggi pada tahun 2016 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,87 persen, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,45 persen, serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,87 persen. Sedangkan kategori yang tingkat harga paling rendah adalah kategori Pertambangan dan Penggalan sebesar minus 3,04 persen.

Grafik 3.6. Laju Pertumbuhan dan Laju Indeks Implisit Per Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

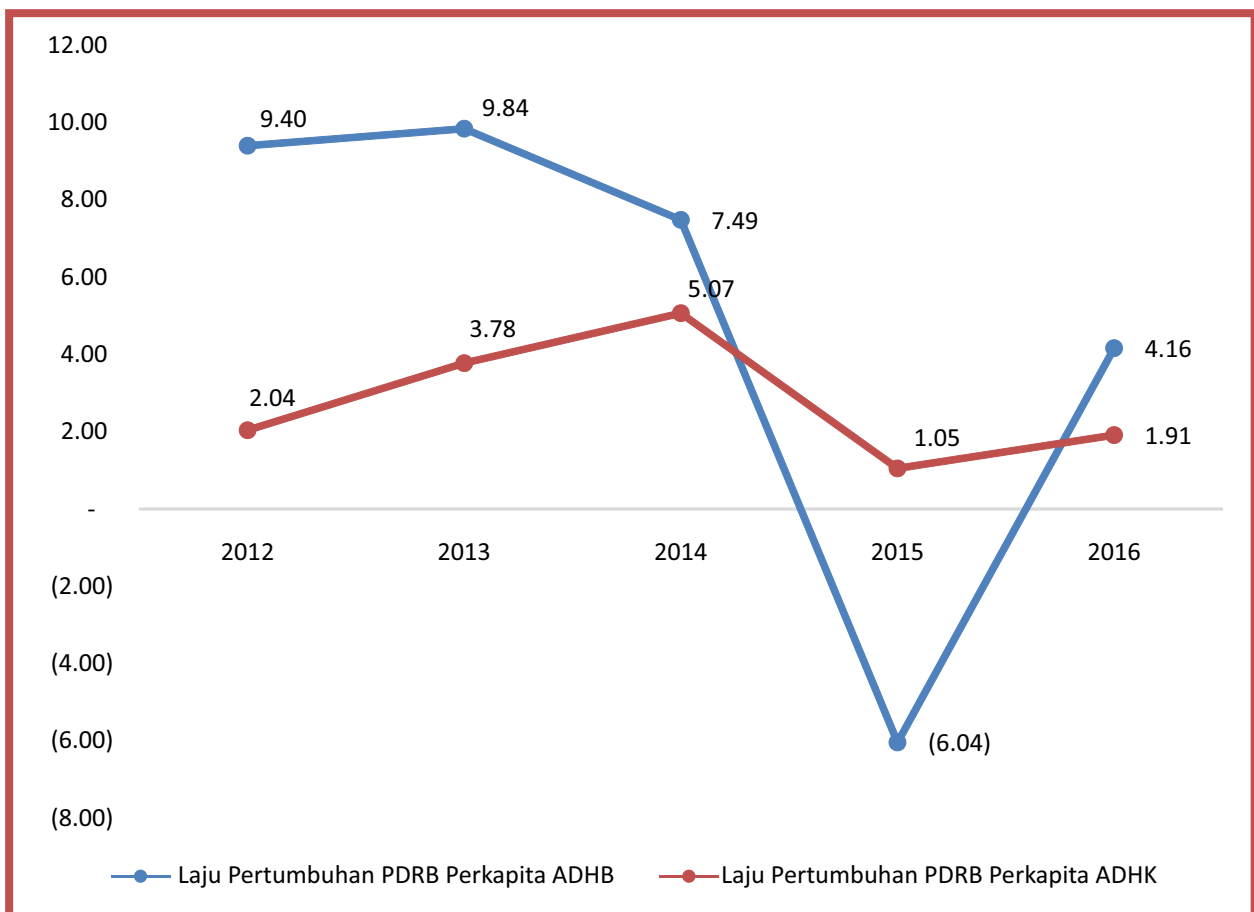
3.3. PDRB Per Kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB Per Kapita dengan Minyak dan Gas Bumi

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus mengalami kenaikan, jika pada tahun 2012 sebesar Rp. 74.996.711,09 perkapita pertahun atau sebesar Rp. 6.249.725,92 perkapita perbulan, terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016 PDRB perkapita menjadi Rp 86.661.835,49 rupiah pertahun atau sebesar Rp 7.221.819,62 rupiah perbulan. Namun, secara riil PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2016 sebesar Rp. 75.506.708,13 perkapita pertahun atau sebesar Rp. 6.292.225,68 perkapita perbulan.

Grafik 3.7. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel. 3.3. PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>
2012	74 996 711,09	67 241 568,31
2013	82 379 878,22	69 780 620,10
2014	88 545 856,70	73 317 324,31
2015	83 241 903,74	74 134 401,83
2016	88.661.835,49	75.506.708,13

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

PDRB Per Kapita Tanpa Minyak dan Gas Bumi

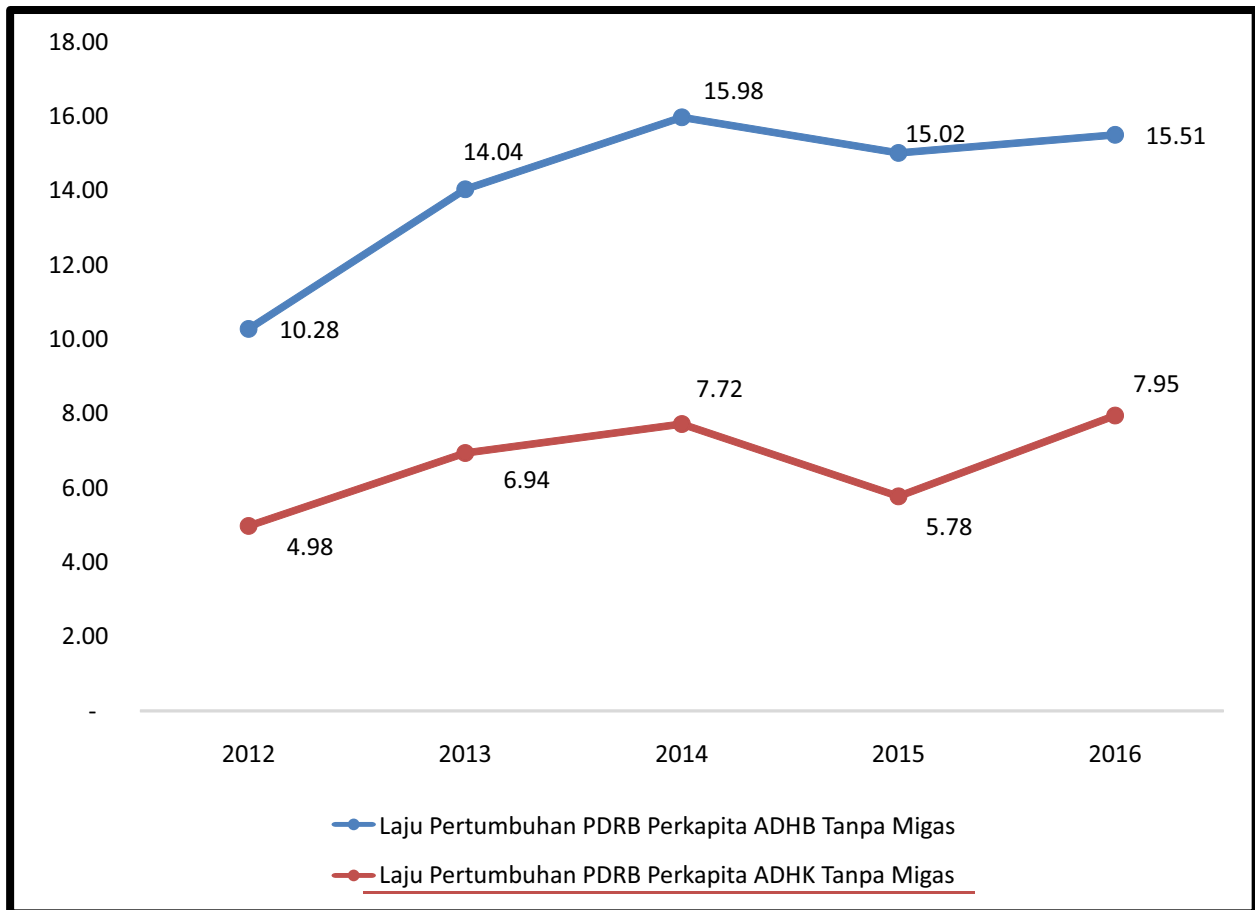
Subkategori minyak dan gas bumi yang telah berproduksi tahun 1997 dan produksinya meningkat pesat sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sehingga PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika subkategori ini tidak dimasukkan dalam penghitungan PDRB perkapita, maka akan diperoleh data bahwa PDRB perkapita non migas tahun 2016 sebesar Rp. 39.300.376,98 rupiah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan perkembangan selama lima tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 3.4. dibawah ini:

Tabel 3.4. Perkembangan PDRB Perkapita Tanpa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>
2012	22 364 903,38	19 915 682,29
2013	25 503 345,84	21 298 354,03
2014	29 580 430,43	22 942 783,34
2015	34 023 334,75	24 267 314,59
2016	39.300.376,98	26.197.982,42

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Grafik 3.8. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita **Tanpa Minyak dan Gas Bumi** di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selain melihat besaran dari PDRB Perkapita tersebut perlu juga dilihat perkembangan PDRB perkapita dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Hal ini berguna untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun.

BAB IV

TINJAUAN KATEGORI LAPANGAN USAHA



Bab IV

Tinjauan Kategori Lapangan Usaha

4.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan; subkategori Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan sebagai usaha rumah tangga ataupun usaha perusahaan secara khusus.

Penghitungan nilai tambah kategori ini dilakukan dengan metode pendekatan produksi, dimana output didapatkan dari hasil perkalian antara jumlah produksi masing-masing komoditi dengan harga per unitnya.

Selanjutnya nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengeluarkan biaya antara dari outputnya. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 pada umumnya dihitung dengan cara revaluasi, yaitu output produksi masing-masing tahun dinilai berdasarkan harga konstan tahun 2010.

Pada tahun 2016 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi kedua tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 19,94 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18,14 persen. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian menyumbang 10,26 persen; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu menyumbang sebesar 3,60 persen; dan subkategori Perikanan menyumbang 6,08 persen. Nilai tambah atas dasar harga berlaku pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2015 adalah Rp 3.721,21 miliar rupiah. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 2.422,29 miliar rupiah.

Secara umum, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, dimana laju pertumbuhan kategori ini mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan kategori ini

mencapai 8,94 persen pada tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen. Peningkatan laju yang cukup signifikan ini bersumber dari meningkatnya pertumbuhan subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian sebesar 9,10 persen; serta pertumbuhan subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 12,25 persen.

4.2. Pertambangan dan Penggalian

Kegiatan Pertambangan dan Penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pemboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan dibawah tanah dan diatas permukaan bumi. Sifat dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut.

Metode penghitungan yang digunakan untuk sektor ini adalah pendekatan produksi. Output utama subsektor ini diperoleh dari hasil perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi, ditambah nilai barang dan jasa lainnya yang merupakan produk sampingan perusahaan pertambangan tersebut. Penghitungan output atas dasar harga konstan menggunakan metode revaluasi yaitu perkalian antara kuantum produksi tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar.

Kategori ini mencakup subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit; subkategori Pertambangan Bijih Logam dan subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Pada tahun 2016, kategori Pertambangan dan Penggalian masih dominan berkontribusi tertinggi terhadap total PDRB kabupaten. Namun, kontribusi kategori ini menurun dari 52,56 persen pada tahun 2015 menjadi 48,40 persen pada tahun 2016. Adapun sumbangan subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi atas dasar harga berlaku sebesar 48,22 persen dan sumbangan subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar 0,19 persen.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar minus 0,31 persen. Penurunan laju kategori ini

bersumber dari penurunan pada subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi sebesar minus 0,34 persen. Nilai tambah atas dasar harga berlaku pada kategori Pertambangan dan Penggalian tahun 2016 adalah Rp 8.997,54 miliar rupiah. Sedangkan nilai tambah bruto kategori ini atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 9.674,10 miliar rupiah.

4.3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan tahun 2016 menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 1.479,05 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap pembentukan total PDRB kabupaten sebesar 7,93 persen. Pada kategori Industri Pengolahan, subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Batubara dan Pengilangan Migas yaitu sebesar 6,43 persen pada tahun 2016; kemudian diikuti oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 1,10 persen; Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional sebesar 0,12 persen; Industri Barang Galian bukan Logam sebesar 0,10 persen, dan Industri Furnitur sebesar 0,08 persen.

Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan secara keseluruhan tercatat melambat dari 2,68 persen pada tahun 2015 menjadi 1,08 persen pada tahun 2016. Secara umum, seluruh subkategori mengalami pertumbuhan positif namun ada beberapa subkategori yang mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2015, antara lain subkategori Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman dengan pertumbuhan minus 2,28 persen, dan subkategori Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional dengan laju pertumbuhan minus 4,15 persen.

4.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Nilai tambah yang dihasilkan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2016 sebesar Rp 3.274,6 juta rupiah, dimana 67,15 persen dari seluruh nilai tambah kategori ini disumbangkan oleh subkategori Ketenagalistrikan yaitu Rp 2.198,8 juta rupiah dan 32,85 persen oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es dengan nilai Rp 1.075,8 juta rupiah. Kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2012-2016 relatif kecil, hanya berkisar 0,02 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2016 adalah sebesar 5,07

persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9,73 persen. Masing-masing subkategori juga mencatatkan pertumbuhan yang meningkat, dimana subkategori Ketenagalistrikan sebesar 4,35 persen dan subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 7,20 persen di tahun 2016.

4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Selain itu, kategori ini juga mencakup kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air (air sungai, danau, mata air, hujan, dan lainnya), namun tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Tahun 2016, nilai tambah bruto yang dihasilkan kategori ini sebesar Rp 11.823,6 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 10.655,00 juta rupiah. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2012-2016 nilainya relatif konstan antara 0,05 sampai 0,06 persen.

4.6. Konstruksi

Kategori Konstruksi menyumbang sebesar 4,26 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, dengan nilai tambah sebesar Rp 794.548,9 juta rupiah. Kontribusi kategori ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sebesar 2,98 persen menjadi 4,26 persen pada tahun 2016. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari 2015 sebesar 2,66 persen menjadi 6,54 persen pada tahun 2016.

4.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada tahun 2016, kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,13 persen dengan nilai tambah bruto sebesar Rp 1.331,08 juta rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Hampir 87 persen kategori ini ditopang oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan sisanya berasal

dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Laju pertumbuhan kategori ini tercatat sebesar 12,61 persen pada tahun 2016, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,11 persen pada tahun 2015.

4.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel; subkategori Angkutan Darat; subkategori Angkutan Laut; subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; subkategori Angkutan Udara; serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir.

Pada tahun 2016, kategori ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,31 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 1,23 persen. Kategori ini menciptakan nilai tambah bruto sebesar Rp 244.829,8 juta rupiah terhadap total PDRB. Subkategori Angkutan Darat menjadi penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kabupaten sebesar 0,83 persen.

Laju pertumbuhan kategori ini mengalami peningkatan dari 3,62 persen pada tahun 2015 menjadi 7,74 persen pada tahun 2016. Hal ini ditopang oleh kenaikan pertumbuhan seluruh subkategori terutama subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir.

4.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB sebesar 0,37 persen, sedikit lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya 0,33 persen. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 10,27 persen pada tahun 2016, sedikit lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,57 persen. Subkategori Penyediaan Makan Minum juga mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,32 persen serta subkategori Penyediaan Akomodasi yang tumbuh sebesar 5,96 persen.

4.10. Informasi dan Komunikasi

Nilai tambah yang diberikan oleh kategori Informasi dan Komunikasi tahun 2016 sebesar Rp

276.766,8 juta rupiah. Kontribusi kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 sebesar 1,48 persen; tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan kategori ini menunjukkan trendpositif dimana mengalami percepatan dari 6,05 persen pada tahun 2015 menjadi 9,91 persen pada tahun 2016.

4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi 0,85 persen terhadap total PDRB kabupaten pada tahun 2016, sedikit mengalami naikandari 0,78 persen pada tahun 2015. Kontribusi tersebut terdiri dari 38,92 persen subkategori Jasa Perantara Keuangan; 31,91 persen kontribusi subkategori Jasa Keuangan Lainnya; 28,56 persen kontribusi subkategori Asuransi dan Dana Pensiun; serta 0,60 persen kontribusi subkategori Jasa Penunjang Keuangan. Nilai tambah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2016 mencapai Rp 159.001,5 juta rupiah. Laju pertumbuhan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan trend yang terus melambat. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan kategori ini sebesar 8,95 persen, mengalami percepatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,23 persen.

4.12. Real Estate

Nilai tambah yang diberikan oleh kategori Real Estate tahun 2016 sebesar Rp 110.275,6 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 8,23 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,17 persen. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2016 merupakan laju tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

4.13. Jasa Perusahaan

Nilai tambah yang diberikan oleh kategori Jasa Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp.246.186,5 juta rupiah. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 sebesar 1,32 persen; mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,18

persen. Laju pertumbuhan tahun 2016 tercatat meningkat dari tahun sebelumnya, dimana laju pertumbuhan kategori ini sebesar 7,67 persen, sedikit lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,83 persen.

4.14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut aturannya. Pada tahun 2016 kontribusinya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan yaitu sebesar 2,37 persen, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,27 persen. Sedangkan laju pertumbuhan tahun 2016 tercatat mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, dimana kategori ini tumbuh 5,44 persen melambat dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,39 persen.

4.15. Jasa Pendidikan

Nilai tambah yang diberikan oleh kategori Jasa Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp.587.298,5 juta rupiah. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 sebesar 3,15 persen, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,87 persen. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan kategori ini tumbuh 8,59 persen, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen.

4.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Nilai tambah yang diberikan oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2016 sebesar Rp.98.081,6 juta rupiah. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 sebesar 0,53 persen. Sedangkan laju pertumbuhan tahun 2016 tercatat sedikit melambat dari tahun sebelumnya dengan laju sebesar 9,76 persen.

4.17. Jasa Lainnya

Nilai tambah yang diberikan oleh kategori Jasa Lainnya tahun 2016 sebesar Rp.47.615,36 juta rupiah. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 0,29 persen. Laju pertumbuhan kategori ini juga mengalami sedikit kenaikan dari 6,78 pada tahun 2015 menjadi 7,83 persen pada tahun 2016.

BAB V

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH



Bab V

Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

5.1 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

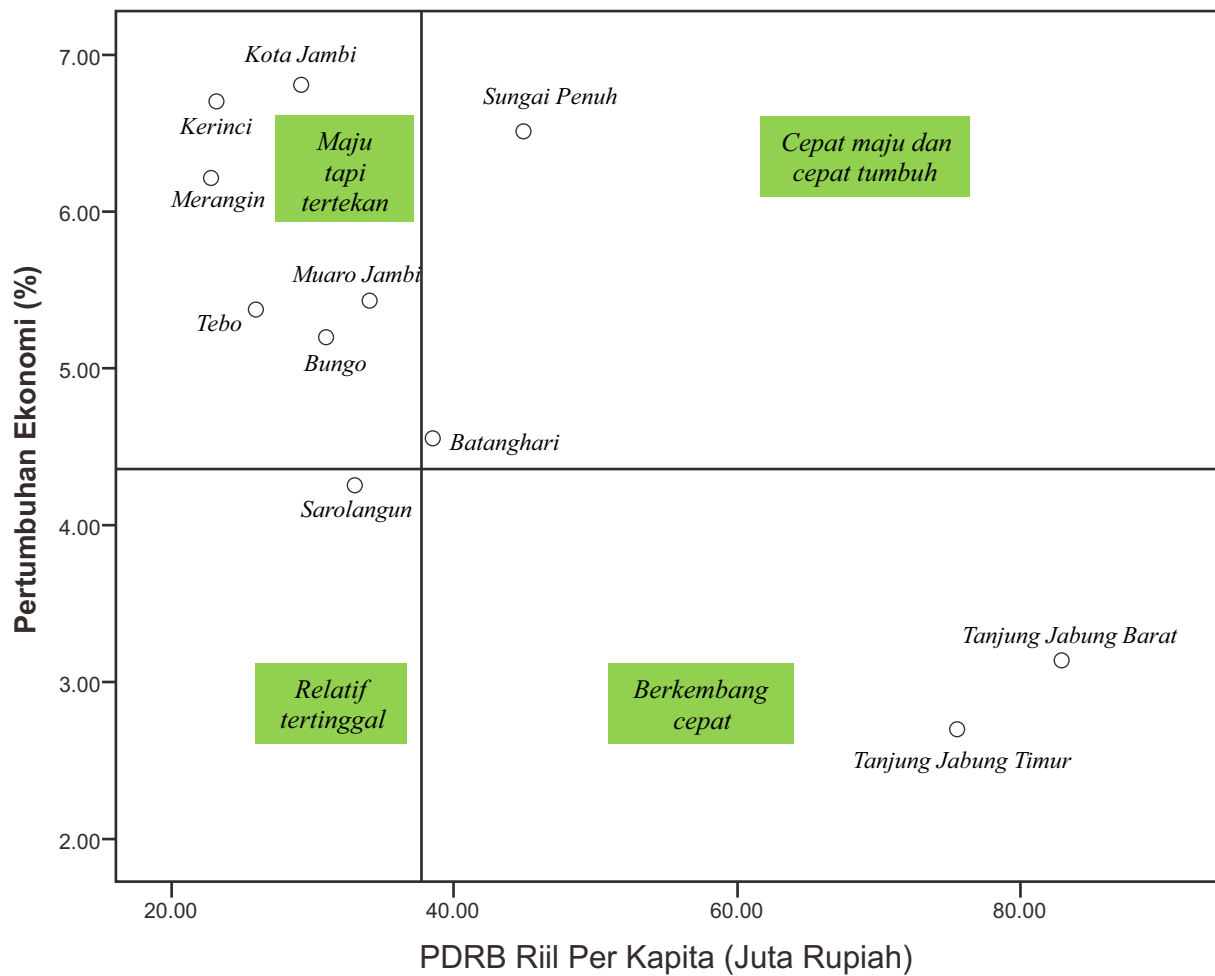
Ketimpangan wilayah yang terjadi dapat dilihat dengan analisis Klassen Typology. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana pengklasifikasian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini, analisis Klassen Typology digunakan untuk membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB per kapita, daerah yang diamati dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu:

- (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income);
- (2) daerah maju tapi tertekan (high income but low growth);
- (3) daerah berkembang cepat (high growth but low income); dan
- (4) daerah relatif tertinggal (low growth and low income).

Berdasarkan hasil pengelompokan dengan Klassen Typology seperti terlihat pada grafik 5.1 dibawah dapat dilihat bahwa Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh dimana hal ini berarti pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi berada di atas angka Provinsi Jambi. Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Kerinci, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju tapi tertekan. Ketiga daerah ini mempunyai pendapatan di atas pendapatan rata-rata provinsi namun laju pertumbuhannya masih rendah dibandingkan pertumbuhan Provinsi Jambi.

Pada klasifikasi daerah yang berkembang cepat terdapat dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah ini mempunyai potensi yang besar sehingga pertumbuhannya cepat, namun pendapatannya masih dibawah pendapatan rata-rata Provinsi. Kabupaten Sarolangun masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan riil perkapitanya lebih rendah dari angka Provinsi Jambi.

Grafik 5.1. Plot Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Jambi Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Jambi

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun, 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 015 712,47	2 331 643,09	2 765 651,13	3 224 062,01	3 721 212,58
2	Pertambangan dan Penggalian	10 047 446,89	10 867 094,95	11 429 796,71	9 344 306,81	9 032 169,17
3	Industri Pengolahan	1 138 507,75	1 317 806,29	1 318 782,32	1 444 877,62	1 479 052,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1 540,89	1 851,72	2 195,62	2 666,68	3 274,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8 253,93	8 639,23	9 453,58	10 654,98	11 823,58
6	Konstruksi	495 630,29	617 130,73	677 520,09	716 909,69	794 548,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	607 386,66	708 159,44	845 546,34	1 041 908,13	1 331 079,10
8	Transportasi dan Pergudangan	130 864,91	150 597,57	196 862,42	217 767,76	244 829,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35 865,89	41 449,20	50 979,65	59 207,21	68 761,47
10	Informasi dan Komunikasi	147 582,65	165 398,43	195 096,95	227 122,85	276 766,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	98 852,27	113 455,44	126 966,30	138 289,65	159 001,53
12	Real Estate	68 933,81	76 188,86	82 713,03	93 891,03	110 275,57
13	Jasa Perusahaan	150 899,38	162 988,10	183 050,94	209 744,00	246 186,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	225 827,95	250 901,65	319 133,92	403 728,76	441 541,24
15	Jasa Pendidikan	413 855,31	439 334,83	462 399,87	509 926,72	587 298,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52 205,45	58 505,83	71 379,72	84 166,09	98 081,55
17	Jasa Lainnya	35 096,12	37 974,62	41 700,18	47 615,36	53 776,06
PDRB		15 674 462,61	17 349 119,97	18 779 228,77	17 776 845,35	18 659 679,77

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun, 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 825 552,95	1 919 450,64	2 105 145,49	2 223 539,32	2 422 290,43
2	Pertambangan dan Penggalan	9 063 551,05	9 282 559,69	9 779 150,15	9 727 726,55	9 697 711,60
3	Industri Pengolahan	1 000 912,66	1 109 996,65	1 102 188,97	1 131 727,93	1 143 938,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1 377,87	1 567,59	1 733,83	1 902,62	1 999,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7 785,46	7 804,96	8 027,43	8 391,09	8 820,18
6	Konstruksi	438 806,35	544 502,48	568 441,66	583 538,41	621 701,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	527 310,87	580 981,80	648 148,59	733 138,44	825 578,61
8	Transportasi dan Pergudangan	121 305,77	132 026,43	142 367,38	147 517,77	158 936,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31 802,90	34 188,79	39 723,29	43 524,79	47 996,39
10	Informasi dan Komunikasi	138 738,57	146 464,55	161 790,86	171 585,39	188 596,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	85 686,37	94 214,44	99 804,83	103 027,46	112 248,92
12	Real Estate	63 481,33	66 941,06	68 081,12	70 922,19	76 759,08
13	Jasa Perusahaan	131 008,53	133 184,23	140 343,16	149 923,30	161 422,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	194 142,58	200 371,45	225 000,50	246 118,55	259 502,11
15	Jasa Pendidikan	344 792,02	358 478,71	367 302,31	385 744,01	418 888,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44 108,53	48 183,72	55 538,40	62 995,55	69 145,33
17	Jasa Lainnya	33 258,45	34 811,62	36 708,85	39 198,19	42 266,12
PDRB		14 053 622,26	14 695 728,81	15 549 496,79	15 830 521,57	16 257 802,37

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun, 2012-2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,86	13,44	14,73	18,14	19,94
2	Pertambangan dan Penggalian	64,10	62,64	60,86	52,56	48,40
3	Industri Pengolahan	7,26	7,60	7,02	8,13	7,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
6	Konstruksi	3,16	3,56	3,61	4,03	4,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3,88	4,08	4,50	5,86	7,13
8	Transportasi dan Pergudangan	0,83	0,87	1,05	1,23	1,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,27	0,33	0,37
10	Informasi dan Komunikasi	0,94	0,95	1,04	1,28	1,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,65	0,68	0,78	0,85
12	Real Estate	0,44	0,44	0,44	0,53	0,59
13	Jasa Perusahaan	0,96	0,94	0,97	1,18	1,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,44	1,45	1,70	2,27	2,37
15	Jasa Pendidikan	2,64	2,53	2,46	2,87	3,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,33	0,34	0,38	0,47	0,53
17	Jasa Lainnya	0,22	0,22	0,22	0,27	0,29
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,52	5,14	9,67	5,62	8,94
2	Pertambangan dan Penggalan	0,21	2,42	5,35	-0,53	-0,31
3	Industri Pengolahan	18,09	10,90	-0,70	2,68	1,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,53	13,77	10,61	9,73	5,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,28	0,25	2,85	4,53	5,11
6	Konstruksi	10,37	24,09	4,40	2,66	6,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	10,18	11,56	13,11	12,61
8	Transportasi dan Pergudangan	5,82	8,84	7,83	3,62	7,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	7,50	16,19	9,57	10,27
10	Informasi dan Komunikasi	5,08	5,57	10,46	6,05	9,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,44	9,95	5,93	3,23	8,95
12	Real Estate	4,54	5,45	1,70	4,17	8,23
13	Jasa Perusahaan	3,61	1,66	5,38	6,83	7,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,59	3,21	12,29	9,39	5,44
15	Jasa Pendidikan	3,21	3,97	2,46	5,02	8,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,04	9,24	15,26	13,43	9,76
17	Jasa Lainnya	3,18	4,67	5,45	6,78	7,83
PDRB		2,78	4,57	5,81	1,81	2,70

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,83	118,13	126,63	140,16	163,80
2	Pertambangan dan Penggalian	110,86	117,07	116,88	96,06	93,14
3	Industri Pengolahan	113,75	118,72	119,65	127,67	129,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	111,83	118,13	126,63	140,16	163,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	106,02	110,69	117,77	126,98	134,05
6	Konstruksi	112,95	113,34	119,19	122,86	127,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	115,19	121,89	130,46	142,12	161,23
8	Transportasi dan Pergudangan	107,88	114,07	138,28	147,62	154,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,78	121,24	128,34	136,03	143,26
10	Informasi dan Komunikasi	106,37	112,93	120,59	132,37	146,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,37	120,42	127,21	134,23	141,65
12	Real Estate	108,59	113,81	121,49	132,39	143,66
13	Jasa Perusahaan	115,18	122,38	130,43	139,90	152,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	116,32	125,22	141,84	164,04	170,15
15	Jasa Pendidikan	120,03	122,56	125,89	132,19	140,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,36	121,42	128,52	133,61	141,85
17	Jasa Lainnya	105,53	109,09	113,60	121,47	127,23
PDRB		111,53	118,06	120,77	112,29	114,77

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	10,01	8,15	10,37	5,95
2	Pertambangan dan Penggalian	7,89	5,61	-0,16	-17,81	-3,04
3	Industri Pengolahan	9,26	4,37	0,78	6,70	1,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,72	5,63	7,20	10,68	16,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,78	4,41	6,39	7,82	5,57
6	Konstruksi	5,87	0,34	5,16	3,08	4,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	5,82	7,03	8,94	13,45
8	Transportasi dan Pergudangan	4,23	5,73	21,23	6,76	4,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,13	7,50	5,86	6,00	5,32
10	Informasi dan Komunikasi	4,97	6,16	6,78	9,77	10,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,91	4,38	5,64	5,51	5,53
12	Real Estate	4,07	4,81	6,75	8,97	8,52
13	Jasa Perusahaan	8,13	6,25	6,58	7,26	9,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	7,65	13,27	15,65	3,73
15	Jasa Pendidikan	12,26	2,10	2,72	5,01	6,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,02	2,59	5,85	3,96	6,17
17	Jasa Lainnya	3,63	3,37	4,14	6,93	4,74
PDRB		7,22	5,85	2,30	-7,02	2,21

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,02	2,50	2,44	2,80
2	Pertambangan dan Penggalian	5,30	5,23	3,24	-11,11	-1,76
3	Industri Pengolahan	1,80	1,14	0,01	0,67	0,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6	Konstruksi	0,50	0,78	0,35	0,21	0,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	0,51	0,64	0,79	1,05	1,63
8	Transportasi dan Pergudangan	0,09	0,13	0,27	0,11	0,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,02	0,04	0,05	0,04	0,05
10	Informasi dan Komunikasi	0,10	0,11	0,17	0,17	0,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,09	0,08	0,06	0,12
12	Real Estate	0,04	0,05	0,04	0,06	0,09
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,08	0,12	0,14	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	0,16	0,39	0,45	0,21
15	Jasa Pendidikan	0,40	0,16	0,13	0,25	0,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,04	0,07	0,07	0,08
17	Jasa Lainnya	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
PDRB dengan Migas		10,20	10,68	8,24	-5,34	4,97

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	0,67	1,26	0,76	1,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,14	1,56	3,38	-0,33	-0,19
3	Industri Pengolahan	1,12	0,78	-0,05	0,19	0,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	0,30	0,75	0,16	0,10	0,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	0,28	0,38	0,46	0,55	0,58
8	Transportasi dan Pergudangan	0,05	0,08	0,07	0,03	0,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01	0,02	0,04	0,02	0,03
10	Informasi dan Komunikasi	0,05	0,05	0,10	0,06	0,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,06	0,06	0,04	0,02	0,06
12	Real Estate	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,02	0,05	0,06	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,04	0,04	0,17	0,14	0,08
15	Jasa Pendidikan	0,08	0,10	0,06	0,12	0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01	0,03	0,05	0,05	0,04
17	Jasa Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
PDRB dengan Migas		2,78	4,57	5,81	1,81	2,70

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara